

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berawal dari adanya permohonan *Judicial Review* Aisyah Mochtar pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang dianggap bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini berfokus pada dampak pada pengaturan pencatatan akta kelahiran anak diluar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan sinkronisasi standart pelayanan publik dalam pencatatan akta kelahiran anak diluar nikah di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau bisa disebut penelitian lapangan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan respon masyarakat Bator Kecamatan Klampis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuisioner. Kemudian dianalisa dengan metode *induktif-prespektif*. Hasil penelitian dalam Sinkronisasi Pengaturan Legalitas Pencatatan Akta Kelahiran Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan). Dampak adanya pengaturan putusan mk dalam pencatatan akta kelahiran anak diluar nikah sangat berpengaruh namun dalam pelaksanaan Putusan MK ini perlu adanya aturan yang menguatkan. Standar pelayanan publik yang dilakukan Dispenduk Bangkalan setelah dan sebelum putusan MK ini baik sesuai Standar Pelayanan Prosedur (SOP).

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pencatatan Akta Kelahiran, Anak Diluar Nikah

ABSTRACT

The existence of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 began with the application for Judicial Review by Aisyah Mochtar in Article 43 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which considered to be contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study focuses on the impact of regulating the registration of birth certificates for children out of wedlock after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and synchronizing public service standards in recording birth certificates for children out of wedlock at the Department of Population and Civil Registration of Bangkalan Regency after the Constitutional Court Decision Number 46 /PUU-VIII/2010. This research is used empirical research or can be called field research. The approach used is a sociological juridical approach and a case approach. The location of the research was carried out at the Population and Civil Registration Office of Bangkalan Regency and the response of the Bator community, Klampis District. The types and sources of data used primary and secondary data. The data collection methods used interviews and questionnaires. Then analyzed using inductive-perspective methods. The results of the research in Synchronizing the Legality of Registration of Birth Certificates of Out-of-Marriage Children after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 (Case Study at the Department of Population and Civil Registration of Bangkalan Regency). However, in implementing the Constitutional Court's decision, it is necessary to have rules that strengthen it. The standard of public services carried out by the Bangkalan Dispenduk after and before the Constitutional Court's decision following with the Standard Service Procedure (SOP).

Keywords: Constitutional Court Decision, Birth Certificate Registration, Children Out of Wedlock

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian	13

1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis Penelitian.....	17
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	17
1.6.3 <i>Sampling</i>	18
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	18
1.6.5 Analisis Data.....	21
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Legalitas.....	22
2.2 Pengertian Anak Diluar Nikah.....	22
2.3 Teori Kewenangan.....	26
2.4 Teori Kepastian Hukum.....	29
2.5 Konsep Pelayanan Publik.....	33
2.6 Prinsip Pemerintahan yang Baik.....	39
 BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Dampak Pengaturan Pencatatan Akta Kelahiran Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	42
3.1.1 Prosedur Pencatatan Akta Kelahiran Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	42
3.1.2 Dampak Pengaturan Pencatatan Akta Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	53
3.2 Penyesuaian Standar Pelayanan Publik Dalam Pencatatan Akta Kelahiran Anak Diluar Nikah Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010.....	61

3.2.1 Penyesuaian Standar Pelayanan Publik Dalam Pencatatan Akta Kelahiran Anak Diluar Nikah Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.....	61
3.2.2 Respon Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan Dalam Pencatatan Akta Kelahira Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	70
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87
BIODATA PENULIS	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasi

Tabel 2 : Kriteria responden untuk sampling

Tabel 3 : Kuisioner Pertanyaan Kepada Masyarakat Bator Kecamatan Klampis

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Data

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 Foto Waktu Penelitian